

Nama : Rieke Nindita Sari

NPM : 2313031019

Kelas : A

JAWABAN UAS EKONOMI PENDIDIKAN

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus :

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan:

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawab:

1. Efisiensi internal dalam hal ini mengukur sejauh mana input pendidikan (anggaran, tenaga, waktu) menghasilkan output pendidikan yang optimal, seperti tingkat kelulusan dan prestasi belajar. Pada kasus di Kabupaten A, diketahui bahwa alokasi sebesar 30% sudah tergolong besar, namun pengalokasian sebagian besar anggaran masih terfokus pada pembangunan gedung fisik. Akibatnya, komponen yang langsung berpengaruh pada proses

pembelajaran, seperti pelatihan guru, kurikulum, dan media digital justru terabaikan dan tidak diprioritaskan. Hal ini menunjukkan inefisiensi internal yang berarti anggaran besar tidak secara otomatis menghasilkan kualitas belajar yang meningkat karena pendistribusian anggarannya tidak proporsional. Sedangkan efisiensi eksternal mengukur relevansi output pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Meskipun angka partisipasi sekolah naik, kualitas hasil belajar tidak ikut berkembang. Hal ini berkaitan dengan kualitas gurunya yang seharusnya bisa lebih baik untuk mengajar peserta didik akibat adanya anggaran untuk pelatihan namun oleh pihak berwenang tidak diprioritaskan. Artinya, output yang dihasilkan belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial jangka panjang.

2. Kebijakan yang terlalu berorientasi pada infrastruktur fisik akan menghasilkan SDM yang secara kuantitatif hadir disekolah, tetapi secara kualitatif tidak berkembang. Dalam perspektif *human capital*, investasi pendidikan yang tidak menyentuh aspek kompetensi guru dan kualitas pembelajaran tidak akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan. Sehingga diperlukan relokasi anggaran secara proporsional, seperti minimal 40% dari dana pendidikan diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan pengembangan kurikulum. Selain itu pembangunan gedung diprioritaskan hanya di daerah yang benar-benar kekurangan ruang untuk belajar. Serta penerapan sistem monitoring berbasis hasil belajar, bukan sekedar realisasi belanja fisik saja.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus:

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan:

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan. Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawab:

1. Dalam kasus diatas mencerminkan adanya ketimpangan horizontal berbasis geografis, yaitu kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini tampak dalam tiga dimensi. Yaitu input seperti guru profesional dan fasilitas lengkap hanya terkonsentrasi di kota, proses seperti akses internet dan teknologi pembelajaran tidak merata, serta output seperti hasil ujian siswa desa jauh di bawah siswa kota. Kondisi ini sejalan dengan konsep *inequality of educational opportunity* yang artinya bahwa kesempatan mendapat pendidikan berkualitas tidak didistribusikan secara adil berdasarkan kebutuhan.
2. Ketimpangan pendidikan yang berlangsung lama akan memperburuk kesenjangan ekonomi antargenerasi. Siswa di desa tumbuh dengan modal manusia yang lebih rendah, sehingga peluang mereka mendapatkan pekerjaan layak dan penghasilan memadai ikut terbatas. Dalam skala makro, hal ini menghambat adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional karena potensi produktif sebagian besar penduduk tidak berkembang optimal. Sehingga perlu beberapa kebijakan seperti *affirmation action* anggaran dimana alokasi dana pendidikan lebih besar untuk daerah tertinggal berdasarkan indeks kebutuhan, program redistribusi guru melalui insentif finansial dan non-finansial bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, serta perluasan infrastruktur digital pedesaan yang diintegrasikan dengan program pembelajaran jarak jauh.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus:

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan:

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut. Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

Jawab:

1. Teori *human capital* (Becker, 1964) menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi yang seharusnya meningkatkan produktivitas dan nilai seseorang di pasar kerja. Namun pada kasus Kota B, investasi pendidikan tidak menghasilkan *return* yang diharapkan karena terjadi *mismatch* kompetensi artinya lulusan perguruan tinggi memiliki gelar, tetapi tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Sehingga ini menunjukkan bahwa kualitas *human capital* tidak cukup diukur dari lama studi atau tingkat pendidikan semata, melainkan dari relevansi kompetensi yang diperoleh. Jika kurikulum perguruan tinggi tidak selaras dengan perkembangan dunia kerja, investasi pendidikan justru menjadi tidak efisien.
2. Terjadi kesenjangan struktural antara sistem pendidikan dan pasar kerja. Perguruan tinggi memproduksi lulusan berdasarkan struktur kurikulum yang statis, sementara industri terus berkembang dan membutuhkan kompetensi yang dinamis. Akibatnya, terbentuk surplus tenaga kerja terdidik di bidang tertentu sekaligus defisit di bidang lain. Maka dari itu perlu dilakukan dorongan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan industri dalam penyusunan kurikulum (*link and match*). Mewajibkan program magang terstruktur minimal satu semester sebagai bagian kurikulum wajib dan pemerintah perlu menerbitkan proyeksi kebutuhan

tenaga kerja jangka menengah sebagai acuan bagi perguruan tinggi dalam membuka dan menutup program studi.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus:

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawab:

1. Secara teori, barang publik bersifat *non-excludable* (tidak bisa melarang orang mengaksesnya) dan *non-rival* (konsumsi seseorang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain). Pendidikan dasar dan menengah cenderung diperlakukan sebagai barang publik karena negara berkewajiban menyediakannya. Sebaliknya, pendidikan tinggi swasta lebih mendekati barang privat artinya ada biaya akses dan manfaatnya terutama dinikmati individu. Kenaikan UKT 25% pada kasus ini menegaskan posisi universitas swasta sebagai penyedia layanan privat yang berorientasi pada pembiayaan mandiri. Namun, ketika akses menjadi terbatas karena harga, muncul eksternalitas negatif bagi masyarakat karena potensi SDM yang tidak bisa berkembang.
2. Hal ini berdampak pada keluarga berpenghasilan rendah terpaksa mengorbankan pendidikan tinggi demi kebutuhan primer (*trade-off* konsumsi), terjadi reproduksi ketimpangan sosial (hanya kalangan mampu

yang bisa mengakses pendidikan berkualitas) dan dalam jangka panjang bisa jadi mobilitas sosial vertikal melemah karena pendidikan tidak lagi menjadi jalan naik kelas bagi masyarakat bawah.

3. Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk menghasilkan eksternalitas positif yang manfaatnya tidak hanya dirasakan individu, tetapi oleh seluruh masyarakat (tenaga kerja produktif, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial). Karena manfaat sosialnya melebihi manfaat privat, pasar tidak akan mendistribusikan akses pendidikan secara optimal tanpa campur tangan negara. Seperti, Perluasan program beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi (*need-based scholarship*), Regulasi batas maksimum kenaikan UKT per tahun, dan mahasiswa mampu membayar lebih untuk mensubsidi mahasiswa kurang mampu melalui sistem UKT berkeadilan.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus:

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan:

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawab:

1. Biaya pendidikan tidak hanya mencakup biaya langsung (SPP, buku), tetapi juga biaya tidak langsung seperti perangkat digital dan kuota internet. Bagi keluarga kurang mampu, biaya-biaya ini menjadi hambatan nyata yang secara langsung menurunkan partisipasi belajar. Opportunity cost dalam konteks ini adalah nilai pengorbanan yang dialami siswa ketika tidak bisa

mengikuti pembelajaran digital seperti mereka kehilangan kesempatan memperoleh ilmu, keterampilan, dan pada akhirnya prospek karier yang lebih baik. Di sisi keluarga, uang yang dikeluarkan untuk perangkat digital bersaing dengan kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya, hal ini menciptakan dilema ekonomi yang nyata.

2. Kesenjangan digital (*digital divide*) memperparah ketimpangan pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Siswa dari keluarga mampu mendapat pengalaman belajar yang kaya dan interaktif, sementara siswa miskin tertinggal bahkan dalam hal konten paling dasar. Jika dibiarkan, kesenjangan ini akan terakumulasi dan menghasilkan generasi dengan kapasitas *human capital* yang sangat tidak setara. Maka dari itu perlu adanya kebijakan seperti, program subsidi perangkat dan kuota internet bagi siswa dari keluarga penerima bantuan sosial, pengembangan konten pembelajaran *offline* yang bisa diakses tanpa konten internet (*offline-first learning*), pembangunan pusat belajar digital komunitas di desa yang dilengkapi perangkat dan koneksi internet gratis, dan Integrasi program digitalisasi pendidikan dengan program perlindungan sosial yang sudah berjalan (PKH, PIP).